

implementasinya, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pemerintah pusat maupun daerah masih dihadapkan pada persoalan mendasar berkaitan dengan efektifitas, efisiensi yang masih lemah dan kualitas daya dukung aparatur yang belum optimal. Implikasinya jelas, keluhan dan pengaduan masyarakat masih begitu banyak terjadi.

Sesuai dengan peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman pelayanan publik, pemerintah harus meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui beberapa aspek yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas, kecepata, keadilan, kepastian biaya dan keoastian jadwal. Kualitas pelayanan publik adalah kesesuaian pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik.

Pada tahun 2015 dapat diketahui bahwa tingkat penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada tindakan korupsi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan *Transparency International* (TI), Skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2015 adalah 34 (peringkat 109 dari 177 negara) dan skor CPI tahun 2016meningkat tipis menjadi 37(peringkat 105 dari176(negara). Meski mengalami kenaikan, Indonesia masih dipandang sebagai negara yang rawan korupsi dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, Thailand, dan Myanmar.<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 berimplikasi positif bagi daerah dalam melakukan pembangunan di segala bidang termasuk kegiatan penanaman modal. Demikian juga sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa urusan penanaman modal termasuk urusan wajib yang

dil:

per

per

No

ket

Tal

tid:

dil:

27

bel

pro

peningkatan

meningkatnya

iran Presiden

PTSP) maka

ppres No. 29

A dan PMDN

yang akan

Perpres No.

inan meliputi

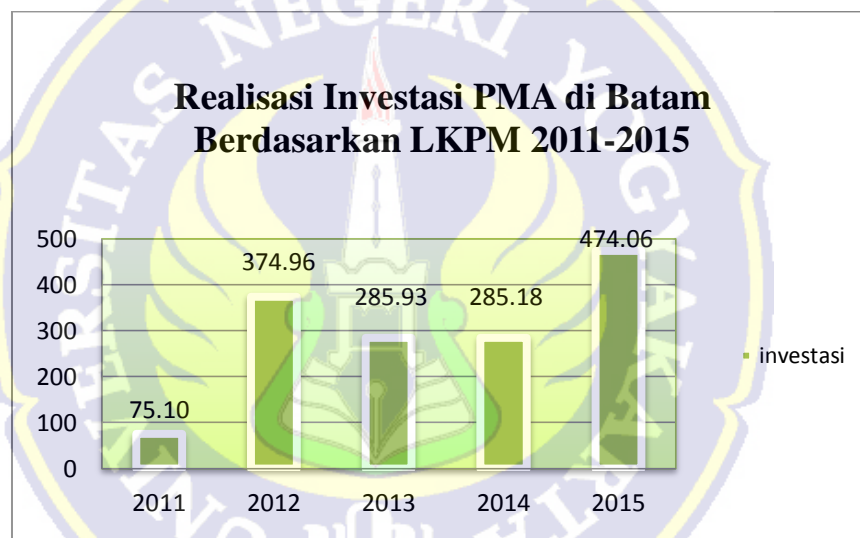
tata cara dan



1. Mudah, alur proses penyelesaian permohonan sederhana dalam pengertian mudah dipahami dengan persyaratan yang sederhana
2. Cepat, waktu proses penyelesaian permohonan dipersingkat
3. Tepat, kesesuaian produk dengan ketentuan peraturan perundangan
4. Akurat, pemberian fasilitas impor mesin, barang dan bahan sesuai dengan kebutuhan produksi
5. Transparan dan akuntabel, alur proses penyelesaian permohonan jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Peraturan yang secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan satu pintu adalah Perka No. 12 Tahun 2009, sebab tata cara permohonan perizinan penanaman modal diatur di dalamnya sedangkan penerbitan perizinan dilakukan dengan menggunakan SPIPISE. Sistem yang diakses melalui

internet *Nasional Single Window for Investment* (NSWI) dapat dilakukan secara *online*.

Batam menjadi salah satu daerah yang diharapkan mampu menjaring investor untuk menanamkan modal kewilayahnya. Di tengah kebijakan desentralisasi daerah, letak geografis Batam yang strategis dan status istimewa Batam sebagai *Free Trade Zone Area*, diharapkan mampu meningkatkan investasi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah Investasi Penanaman Modal Asing pada tahun 2011 – 2015 di Kota Batam mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi investasi dibawah ini :



Gambar 1. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di Kota Batam. Sumber : PPDSI Badan Pengusahaan Batam 2015

Berdasarkan data Tabel 1 Realisasi investasi penerimaan modal asing di Kota Batam trendnya sedikit lebih baik, dimana terjadi peningkatan signifikan dari kurun waktu 2011 hingga 2015. Pada 2011 realisasi investasi mencapai 75,10 Juta US \$ dan pada 2015 realisasi investasi mencapai 474,06 Juta US \$. Persentase peningkatan investasi hampir sebesar 600 persen merupakan capaian positif, meskipun disisi lain secara agregat kuantitas

